



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2445/DJU/SK/HM.02.3/10/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PESERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PEMBARUAN REGISTER ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya pengelolaan Pengadilan yang efektif, efisien dan modern diperlukan penerapan register elektronik / e-register sebagai salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik;
- b. bahwa untuk mewujudkan penerapan register elektronik secara penuh, maka perlu dipastikan bahwa seluruh register yang digunakan dalam administrasi penanganan perkara sudah terakomodir dalam SIPP;
- c. bahwa untuk itu perlu dilakukan kegiatan penyusunan kebijakan terkait pembaruan register elektronik.
- d. bahwa memperhatikan huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Kebijakan terkait Pembaruan Register Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

3.....

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
4. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1153/DJU/HM02.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 Hal Penerapan Register Elektronik pada Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
11. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA 005.03.097 450/2022 tanggal 17 November 2021.

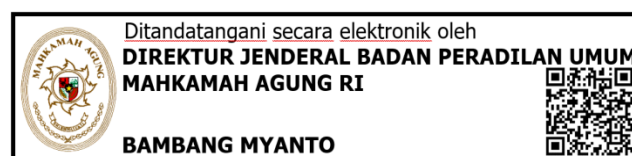
MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBARUAN REGISTER ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk mengikuti Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembaruan Register Elektronik Di Lingkungan Peradilan Umum.
- KEDUA : Peserta dibebaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai **tanggal 07 November s.d 09 November 2022.**
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor DIPA 005.03.097 450/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2022



Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum
Nomor : 2445/ DJU/SK/HM.02.3/10/2022
Tanggal : 28 Oktober 2022

**PESERTA KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBARUAN REGISTER
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	2	3	4
1.	MUSTAFA DJAFAR, SH., MH NIP : 197204111992031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2.	MARLIN SIMANJUNTAK, SH., MH. NIP : 196904131990031005	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur
3.	ROTUA ROOSA MATHILDA TAMPUBOLON, SH., MH. NIP : 19700305 199103 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Pengadilan Negeri Denpasar
4.	RAVITA LINA, SH., MH. NIP : 196811061989032002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengadilan Negeri Karawang
5.	BEN BELLA HUSIN, SH., MH. NIP : 196401071991031005	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat
6.	BAMBANG SIRAJUDDIN, SH., MH. NIP : 196410141983111001	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur
7.	I GEDE RENASA, SH., MH. NIP : 197306161993031004	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara
8.	EDI SARWONO, SH., MH. NIP : 197302171997031001	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
9.	M. TAUFIK, SH., MH. NIP : 198111102003121002	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang
10.	DJURIA SIMBUANG, SH., MH. NIP : 196701061991032002	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong
11.	YUNITA SOFRIANI, SH., MH. NIP : 197006131995032001	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	2	3	4
12.	ERNIWATI, SH., MH. NIP : 197709122002122003	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bogor
13.	SUTRISNO, SH., MH. NIP : 197205101993031006	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Depok
14.	ACHMAD NURJAMAN, SH., MH NIP : 196805181991031001	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Cibinong
15.	WAHYU GUNAWAN, SH., MH. NIP : 198411242009041006	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara
16.	ACHMAD BASYARI, SE. NIP. 19820920 200604 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pelayanan Peradilan
17.	MUHAMMAD YUSUF SHALAHUDDIN, ST., SH., MH. NIP : 198306162011011012	Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Depok
18.	ROSALIA PUSPA K, SE., MH. NIP. 19801023 201101 2 005	Penata (III/c)	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi
19.	ASN Dukcapil		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20.	ASN Dukcapil		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
21.	DODON ANGIN WIYONO, S.Kom. NIP. 19820819 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama
22.	LARMI KRISTIANI, SH. NIP. 19870713 202203 2 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan, Seksi Pelayanan Peradilan
23.	RIKI NANDA DWI PUTRA, SH. NIP. 19940402 202203 1 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan, Seksi Tata Persidangan
24.	SAFITRI, A.Md. NIP. 19900223 201503 2 002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengolah Data, Seksi Tata Persidangan
25.	LAILY FAUZIAH NIP. 198810022020122010	Pengatur (II/c)	Staf TU Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor